

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS (Studi Kasus pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu)

Yoan Fadillah Siregar¹, Pirma Sibarani²

^{1,2}Politeknik Negeri Medan

Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Medan Baru

yoan.siiregar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2021. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PTPN IV Unit Pks Pabatu dinilai telah sesuai dengan standar yang ada pada Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, (2) Terdapat kelemahan pada dua komponen sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 yang unsur-unsurnya belum sepenuhnya diterapkan oleh PTPN IV Unit PKS Pabatu yaitu komponen lingkungan pengendalian dan komponen kegiatan pengendalian.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Penerimaan Kas, dan Pengeluaran Kas.

1. PENDAHULUAN

Pengendalian intern merupakan alat manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas perusahaan dalam melindungi hartanya, serta untuk menilai organisasi yang ada serta operasi yang dilakukan perusahaan, kesemuanya ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari timbulnya kesilapan, kecurangan dan penyelewengan (Baridwan, 2004:13). Pengendalian meliputi struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan dan pelaporan (administrasi), budget dan standart audit internal. Pengendalian internal sangat diperlukan oleh semua perusahaan, baik pada perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang kecil maupun besar. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik maka kekayaan perusahaan akan aman dari penyalahgunaan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rama dkk (2008:134) terdapat empat sasaran atau tujuan pengendalian intern yaitu: (1) efektivitas dan efisiensi operasi, (2) penyajian laporan keuangan yang wajar, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) pengamanan aset. Selain untuk pengamanan aset, sistem pengendalian internal juga mengatur pembagian tanggung jawab dan otorisasi yang akan sangat menunjang tujuan pengamanan aset. Salah satu harta yang sulit untuk diawasi serta dikendalikan dalam sebuah perusahaan yaitu kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva lancar yang sifatnya likuid (paling lancar) pada umumnya digunakan segera untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari (Martani, 2014:180). Keberadaan kas dalam perusahaan sangat penting, karena apabila kas perusahaan kurang memadai maka pembiayaan operasional

perusahaan tidak dapat berjalan dengan lancar seperti entitas tidak dapat membayarkan gaji karyawan, memenuhi utang jatuh tempo serta kewajiban lainnya. Karena begitu mudahnya uang dialihkan atau dipindah tangankan, maka kas merupakan aset yang cenderung diselewengkan atau disalahgunakan karyawan (Halim, 2008:321). Kas mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh aktiva lainnya, yaitu kas tidak mudah diidentifikasi pemiliknya, bentuknya relatif kecil, mudah dipindah tangankan melalui transfer dalam kurun waktu yang relatif singkat, mudah dibawa-bawa dan keinginan untuk memilikinya tinggi. Sehingga selalu menjadi sasaran penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelewengan maka sudah seharusnya perusahaan merancang pengendalian internal yang baik agar kas tetap aman dan terlindungi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya selalu ada perusahaan yang lalai dalam menerapkan pengendalian internalnya, sehingga sangat memungkinkan bagi pihak tertentu dalam mencari celah dari setiap sistem yang ada untuk melakukan penyelewengan.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti terhadap PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu yaitu sistem pengendalian intern yang ada pada perusahaan sudah berjalan, namun dalam penerapannya masih belum didukung dengan sistem pengendalian yang menjamin keamanan harta perusahaan khususnya pada kas. Adapun kondisi yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu yaitu masih ditemukan rangkap tugas antara fungsi anggaran dengan fungsi finansial pada kas perusahaan yang dipegang oleh satu orang yang sama yaitu oleh fungsi penganggaran disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurang faham nya beberapa karyawan terhadap wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan, serta terjadinya kekurangan biaya operasional perusahaan dalam jumlah yang besar diakibatkan kurangnya komunikasi dengan baik.

Fenomena diatas merupakan salah satu akibat dari kurang nya penerapan pengendalian intern perusahaan yang memadai sehingga mudahnya terjadi kesalahan serta dapat memungkinkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penyelewengan terhadap kas. Oleh karena itu, pengendalian intern memiliki perananan penting bagi sebuah perusahaan. Menurut Sanyoto (2007:124), salah satu faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern adalah tanggung jawab utama untuk melindungi assets organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang ada, sehingga manajemen harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem

Pengertian sistem menurut beberapa para ahli diantaranya Mulyadi (2016:2) mengatakan bahwasanya sistem merupakan sekelompok unsur-unsur yang sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Harahap S.H., dkk (2015:1) mengatakan bahwa sistem merupakan sekelompok unsur-unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya , yang berfungsi dan bertugas bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh sistem itu tak lepas pada suatu prosedur, dan dapat dikatakan bahwasanya unsur-unsur dalam sistem tersebut tidak terlepas pada suatu prosedur.

2.2 Pengendalian Intern

COSO mendefinisikan pengendalian internal adalah proses, yang dilaksanakan oleh direksi/ dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya, yang dirancang untuk memberikan asurans atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan dan ketaatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan semua pengertian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang untuk dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan, melaksanakan kegiatan operasional secara efektif dan efisien, mengamankan aset negara, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

2.3 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern secara umum merupakan suatu bagian dari masing-masing sistem yang digunakan sebagai pedoman dan prosedur operasional perusahaan maupun organisasi. Adapun organisasi maupun perusahaan menggunakan sistem pengendalian intern untuk mengawasi, mengerahkan, dan mengukur sumber daya organisasi atau perusahaan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan serta mempermudah dalam mencapai tujuan tertentu. Mulyadi (2016:129) mengemukakan bahwasanya sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode maupun ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi atau perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan dalam data akuntansi, mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Oleh karena itu, unsur-unsur pengendalian intern pada umumnya akan melekat pada sistem akuntansi yang akan dirancang dalam suatu organisasi ataupun perusahaan.

2.4 Kas

Martani dkk (2012:180) Kas merupakan aset keuangan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Adapun berdasarkan PSAK No 2 kas merupakan investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Sedangkan berpendapat Soemarso (2004:320) yang dimaksud dengan kas yaitu segala sesuatu baik yang berbentuk uang ataupun bukan, yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.

2.5 Pengendalian Intern pada Penerimaan Kas

Utomo, A (2019:21) terdapat beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas:

1. Hanya karyawan tertentu yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas
2. Adanya pemisahan tugas (segregation of duties) antara individu yang menerima kas, mencatat/membukukan penerimaan kas, dan yang menyimpan kas.

3. Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen (sebagai bukti transaksi), seperti slip berita pembayaran (pengiriman) uang (dalam kasus penerimaan uang lewat pos), struk (dalam kasus penerimaan uang lewat konter penuaian) dan Salinan bukti setor uang tunai ke bank.
4. Uang hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh departemen kasir.
5. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal
6. Mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggungjawaban.

2.6 Pengendalian Intern pada Pengeluaran Kas

Mulyadi (2010) menyatakan bahwa pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (biasanya karena jumlah yang relatif kecil), dilaksanakan melalui dana kas kecil. Sistem pengeluaran kas yang terdapat dalam perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan cek apabila dalam jumlah yang besar, akan tetapi apabila kas yang dikeluarkan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil, umumnya perusahaan akan mengeluarkan kas tersebut melalui dana kas kecil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan fakta yang menggambarkan penerapan sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas di PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Kemudian dijelaskan secara transkrip yaitu digambarkan dengan disesuaikan fakta yang terjadi di lapangan serta disajikan dalam wujud kalimat atau kata-kata yang selanjutnya ditarik simpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem pengendalian intern tidak dirancang untuk dapat mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan, tetapi lebih mengutamakan pada usaha-usaha pencegahan serta mengurangi adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan. Penerapan SPIP bersifat menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perusahaan. SPIP berjalan bersama-sama dengan kegiatan lain dalam satuan kerja. Pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan pada PTPN IV Unit PKS Pabatu dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur SPIP yang diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2008 terkait sistem pengendalian internal pemerintah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian yang diterapkan pada PTPN IV Unit PKS Pabatu sebagai berikut:

a. Penegakkan integritas dan nilai etika

Penegakkan integritas dan nilai etika dalam sebuah organisasi dengan maksud agar seluruh karyawan mengetahui peraturan yang berintegritas yang baik serta melaksanakan kewajibannya dengan sepenuh hati dan berlandaskan pada nilai etika yang seharusnya ditaati oleh seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan sehingga para karyawan dapat terbiasa dan tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakannya. Penegakan nilai integritas dan nilai etika umumnya dapat dilihat berdasarkan seberapa konsistennya pimpinan perusahaan dalam menghargai dan mendorong kejujuran para karyawan terhadap tanggung jawabnya. Pada PTPN IV Unit

PKS Pabatu, pimpinan perusahaan masih kurang konsisten dalam menghargai dan mendorong kejujuran para pegawainya. Sehingga hal ini memungkinkan adanya pegawai yang melakukan penyalahgunaan kas. Namun hal ini dapat diminimalisir karena perusahaan telah mengantisipasi agar karyawan bagian tata usaha tidak melakukan penyalahgunaan kas ketika melakukan penerimaan dan pengeluaran kas.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen dalam kompetensi mengacu pada kewajiban karyawan di bidang masing-masing menunjukkan posisi atau jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan menetapkan pegawai sesuai keahliannya. Komitmen terhadap kompetensi telah dilakukan oleh PTPN IV Unit PKS Pabatu. Sebelum melakukan perekrutan karyawan baru perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi, menetapkan kegiatan dan bagian yang dibutuhkan serta menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan pada setiap bagiannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan berbagai pelatihan dan workshop, perusahaan lebih mengutamakan pelatihan tersebut pada karyawan pimpinan.

c. Kepemimpinan kondusif

Kepemimpinan yang kondusif merupakan kemauan dan kemampuan pimpinan instansi dalam menciptakan suasana kondusif yang mampu mendorong para pegawainya agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan dari kepemimpinan kondusif sebagai tauladan untuk dicontoh seluruh karyawan dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk mendorong terwujudnya hal tersebut maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik kepada seluruh karyawan. Pada PTPN IV Unit PKS Pabatu, kepemimpinan yang kondusif telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat ditelaah melalui kepemimpinan manajer dalam menciptakan suasana kondusif yang mampu mendorong para karyawan bagian tata usaha dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan pimpinan instansi merespon secara positif setiap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan dan penganggaran sehingga hal ini mendukung setiap fungsi tata usaha dalam menerapkan SPIP.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, pada PTPN IV Unit PKS Pabatu struktur organisasi telah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Adapun mengenai pelaksanaan evaluasi secara periodik terkait struktur organisasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis oleh pimpinan perusahaan PTPN IV Unit PKS Pabatu tidak terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Hal ini berdampak pada kurangnya karyawan pada bagian tertentu sehingga terdapat beberapa bagian yang melakukan rangkap jabatan dalam jangka waktu yang cukup lama.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pada PTPN IV Unit PKS Pabatu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab belum terlaksana secara menyeluruh. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab pada perusahaan hanya lebih mengutamakan pada karyawan pimpinan seperti asisten dan manajer, sedangkan pada karyawan pelaksana pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kurang terlaksana, hal ini mengakibatkan tersendatnya kegiatan dalam pencapaian tujuan perusahaan serta berdampak pada alur pertanggungjawaban perusahaan yang kurang jelas. Adapun mengenai kompetensi karyawan, pada karyawan pimpinan perusahaan lebih

mengutamakan kompetensi yang dimiliki. Namun pada karyawan pelaksana, perusahaan hanya mengutamakan pengalaman dibidang terkait.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Pada PTPN IV Unit PKS Pabatu, sebelum menerima pegawai baru terlebih dahulu perusahaan mengevaluasi kualifikasi para pelamar kerja berdasarkan data riwayat hidup, surat referensi, dan pemeriksaan latar belakang. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui sumber informasi objektif yang mampu memberikan detail kualifikasi dasar dan pengalaman para pelamar. Setelah para pelamar dinyatakan lulus kualifikasi, perusahaan akan melaksanakan program pelatihan kepada para karyawan pimpinan baru. Pelatihan merupakan suatu proses pendidikan yang diberikan perusahaan untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan para calon karyawan agar dapat memiliki minat dan kesadaran atas pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat mendukung kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Pada PTPN IV Unit PKS Pabatu, pengawasan intern organisasi belum terlaksana sesuai dengan standar PP 60 tahun 2008. Pada perusahaan masih belum terdapat pengawas intern, melainkan hanya diawasi oleh asisten tata usaha. Karena pengawas perusahaan berasal dari pihak eksternal perusahaan. Hal ini berdampak pada kegiatan perusahaan karena pengawas intern sangat dibutuhkan dalam memberi keyakinan yang memadai kepada setiap fungsi terkait ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian tugas setiap fungsi. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui setiap fungsi yang ada pada perusahaan, pada masing-masing fungsi masih adanya pelanggaran ketaatan yang sering terjadi, seperti adanya karyawan yang keluar masuk kantor tidak pada waktunya (pada saat jam kerja). Namun hal tersebut dapat diminimalisir oleh perusahaan, karena perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar.

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Hubungan yang baik selalu dijaga oleh manajer PTPN IV Unit PKS Pabatu dengan pihak-pihak lain dalam hubungan kerja. Hal tersebut karena perusahaan membutuhkan pihak-pihak lain dalam membangun dan mengembangkan bisnis agar menjadi lebih baik. Saran dan kritik dari pihak internal dan eksternal menjadi masukan ataupun referensi bagi perusahaan dalam memperbaiki perusahaan baik secara parsial maupun keseluruhan.

2. Penilaian resiko

Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang harus dihadapi suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh karyawan harus mampu mengidentifikasi, memantau, mengevaluasi kemungkinan yang akan terjadi pada perusahaan. Penilaian resiko pada PTPN IV Unit PKS Pabatu dimulai dari pembentukan visi dan misi yang terintegrasi dengan fungsi utamanya. Dari visi dan misi yang ingin diterapkan perusahaan yaitu menjadi pusat keunggulan pengelolaan perusahaan agro industri kelapa sawit dengan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun resiko yang mungkin timbul, baik bersifat internal maupun eksternal tetap harus diidentifikasi. Permasalahan internal seperti peralatan yang tidak memadai, sumber daya

manusia yang tidak kompeten dan lingkungan kerja yang tidak kondusif harus selalu dalam pengawasan bahkan masalah eksternal seperti perubahan struktur organisasi, bencana alam dan gangguan dari luar. Setelah resiko diketahui maka, selanjutnya pimpinan instansi mengambil keputusan apakah resiko tersebut diterima atau menolak untuk mengambil suatu keputusan. Proses penilaian resiko dalam penerimaan kas dan pengeluaran kas dapat membantu dalam meningkatkan dan optimalisasi dalam pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian resiko terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas oleh PTPN IV Unit PKS Pabatu sebagai berikut:

a. Identifikasi resiko

Penerimaan kas dan pengeluaran kas syarat akan resiko yang akan muncul dalam pelaksanaannya. Masalah yang diidentifikasi yaitu tidak terlaksananya pemungutan liar dalam perusahaan dengan baik, pelayanan yang kurang baik, kurangnya kepatuhan dari karyawan terhadap peraturan yang ada bahkan kurangnya kompetensi karyawan pada bidang yang telah diamanahkan. Hal tersebut akan berdampak pada tidak terealisasinya pencapaian tujuan perusahaan. Dengan berbagai resiko yang mungkin ada, PTPN IV Unit PKS Pabatu tentunya harus sigap dalam menentukan sikap.

b. Analisis resiko

PTPN IV Unit PKS Pabatu telah mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan juga menganalisis risiko sebagai dasar untuk mengelola risiko sesuai dengan PP 60 tahun 2008. Hal ini ditunjukkan dengan menilai jika suatu saat bisa saja terjadi penyelewengan terhadap kas. Untuk mengatasi hal tersebut uang kas disimpan didalam bank dan hanya dapat diakses oleh bagian akuntan. PTPN IV Unit PKS Pabatu telah menentukan adanya dampak resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hal tersebut dapat ditelaah melalui adanya penerapan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas serta adanya audit dan evaluasi secara teratur yang berasal dari pihak eksternal perusahaan. Sehingga adanya kemungkinan terjadi penyelewengan kas dapat dihindari.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan reaksi aktif atas penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga, mampu meminimalisir risiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini ditunjukkan dengan karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana PTPN IV Unit PKS Pabatu telah menerapkan proses penerimaan dan pengeluaran kasnya sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku seperti kebijakan dan prosedur yang berasal perusahaan sendiri. Adapun penerapan dari unsur-unsur kegiatan pengendalian terdiri atas:

a. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan

Pada pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas PTPN IV Unit PKS Pabatu, evaluasi kinerja dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya belum dilaksanakan secara rutin.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan. Sumber daya yang ada harus dibina agar seluruh program dapat tercapai dan tujuan dapat terealisasi sesuai keinginan. Sumber daya manusia pada PTPN IV Unit PKS Pabatu seperti para karyawan pimpinan sudah cukup baik dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Pembinaan sumber daya manusia pada pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan

oleh PTPN IV Unit PKS Pabatu dengan cara visi, misi, tujuan, nilai dan strategi perusahaan disampaikan secara jelas kepada seluruh karyawan bagian tata usaha. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut didukung dengan adanya uraian jabatan yang jelas, prosedur rekrutmen, pelatihan karyawan pimpinan, program kesejahteraan, sistem penilaian kerja, dan rencana pengembangan karir.

b. Pengendalian atas Pengolahan Sistem Informasi

Setiap transaksi seperti penerimaan dan pengeluaran kas yang ada pada PTPN IV Unit PKS Pabatu di proses dengan sistem komputerisasi seperti SAP (System Application and Processing) dengan adanya pembatasan akses ke perangkat lunak sistem tersebut. Perusahaan juga melakukan pengendalian dan pemantauan atas akses perangkat lunak sistem sehingga timbulnya penyelewengan terhadap kas dapat diminimalisir oleh perusahaan.

c. Pemisahan Fungsi

Berkaitan dengan pemisahan fungsi dalam penerimaan dan pengeluaran kas pada PTPN IV Unit PKS Pabatu masih belum diterapkan dengan baik. Pada bagian penganggaran perusahaan dilakukan oleh fungsi anggaran. Fungsi anggaran juga menjabat sebagai fungsi finansial sehingga, dengan demikian fungsi anggaran memiliki fungsi ganda yang sangat rawan terhadap penyelewengan. Dengan tidak adanya pemisahan fungsi tersebut akan berdampak pada tidak fokus nya masing-masing fungsi pada pekerjaan dan keahlian yang ada sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien.

d. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting.

Setiap transaksi yang terjadi dalam penerimaan dan pengeluaran kas pada PTPN IV Unit PKS Pabatu telah dicatat dengan beberapa formulir dan kwitansi yang dikeluarkan oleh asisten tata usaha. Kwitansi merupakan dokumen tanda bukti atas pembayaran yang telah dilakukan maupun pada saat penerimaan uang. Dokumen ini dibuat untuk memudahkan pencatatan arus kas dalam pembukuan. Untuk lebih kuat dalam segi hukum, diperlukan materai dan tandatangan.

e. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pada pelaksanaan pembukuan dan pelaporan PTPN IV Unit PKS Pabatu belum dicatat dengan akurat. Proses pencatatan umumnya dilakukan terlebih dahulu oleh perusahaan sebelum transaksi dilakukan. Adapun mengenai klasifikasi dan pencatatan yang tepat pada seluruh siklus transaksi PTPN IV Unit PKS Pabatu telah terlaksana dengan baik.

f. Pembatasan Akses Sumber dan Pencatatannya

Akses perangkat sumber dan pencatatan pada bagian penggajian PTPN IV Unit PKS Pabatu hanya boleh diakses oleh krani upah. Begitu juga akses perangkat sumber dan pencatatan oleh bagian yang lain. Setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing pada akses dan sumber yang dimilikinya. Sehingga hanya bagian yang ditunjuk yang berhak mengakses sumber dan pencatatan yang diberikan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir timbulnya penyelewengan dalam kas.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif sangat mempengaruhi kemampuan pimpinan instansi dalam membuat keputusan yang tepat dan membantu

karyawan agar mampu memahami tugas dan tanggungjawabnya sehingga diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian intern perusahaan. Untuk dapat menciptakan informasi dan komunikasi yang efektif berdasarkan PP No 60 tahun 2008 dengan kriteria yaitu pimpinan instansi mampu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi dan mampu mengelola, mengembangkan serta memperbarui sistem informasi secara terus menerus sehingga pimpinan instansi mampu melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. PTPN IV Unit PKS Pabatu telah menerapkan suatu sistem informasi keuangan yang berbasis komputer dan terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya dengan baik. Adapun alternatif lain dalam proses komunikasi dan penyampaian informasi dapat diakses pada web resmi PTPN IV. Adanya web diharapkan dapat menunjang kinerja para karyawan serta menyediakan informasi bagi masyarakat.

5. Pemantauan

Pemantauan pada PTPN IV Unit PKS Pabatu dilakukan oleh pihak intern dan pihak eksternal perusahaan. Evaluasi terpisah dilakukan oleh pengawas intern perusahaan yang berasal dari kantor pusat dan pihak eksternal perusahaan yang berasal dari KAP (Kantor Akuntan Publik). Pemantauan dan evaluasi meliputi penilaian, revidu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan. Adapun tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu harus segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan

5. KESIMPULAN

Simpulan

1. Penerapan sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PTPN IV Unit Pks Pabatu dinilai telah sesuai dengan standar yang ada pada Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008.
2. Pada penerapan sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 Masih terdapat beberapa kelemahan pada unsur-unsur sistem pengendalian internal. Adapun dua komponen sistem pengendalian internal berdasarkan PP 60 tahun 2008 yang unsur-unsurnya belum sepenuhnya diterapkan oleh PTPN IV Unit PKS Pabatu yaitu: komponen lingkungan pengendalian pada unsur penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dan komponen kegiatan pengendalian pada unsur revidu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan dan pemisahan fungsi.

Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini yang diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. PTPN IV Unit Pks Pabatu agar menerapkan kebijakan pembinaan sumber daya manusia secara menyeluruh agar seluruh karyawan pimpinan serta karyawan pelaksana memiliki kompetensi yang baik dalam bidang nya sehingga pencapaian tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
2. PTPN IV Unit Pks Pabatu agar membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) agar penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan berjalan sesuai dengan aturan.
3. PTPN IV Unit Pks Pabatu agar melakukan revidu kinerja secara rutin serta melakukan pemisahan tanggung jawab sehingga timbulnya penyelewengan dapat diminimalisir.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. (2004). *Intermediate Accounting* (Edisi Kedelapan ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Black, A. J., & Champion, D. J. (2009). *Metode dan Masalah, Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework: Exsecutive Summary*. Durham: North Carolina.
- Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI. (2004). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2 Tahun 2004 Laporan Arus Kas*.
- Gondodiyoto, S. (2007). *Audit Sistem Informasi Lanjutan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, A. (2008). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Handayani, S. (2020). *Sistem Pengendalian Intern Atas Pengeluaran Kas Pada Pt Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta*. Yogyakarta: Google Scholar.
- Harahap, S. H., & Sanjaya, S. (2016). *Sistem Akuntansi*. Medan: La-Tansa Press.
- Harahap, S. H., Wahyudi, & Sanjaya, S. (2015). *Sistem Akuntansi*. Medan: Perdana Publishing.
- Hikmah, N. (2018). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang*. Makassar: Digital Library Unismuh .
- Irmadayanti, W. (2017). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada Pt. Soci Mas Medan*. Medan: Repository Umsu.
- Jogiyanto. (2009). *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martani, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martani, D., Veronica, S., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2010). *Auditing (Edisi Ketujuh ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, Y. S., & Jannah, A. R. (2020). *Analisis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada PT. Puduarta Insani Medan*. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2 No.1, 112-124.
- Pandiangan, D. S. (2019). *Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada Pt. Bank Mandiri (Persero), Tbk Balai Kota Medan*. Medan: Google Scholar.
- Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Indonesia: (<http://www.biomaterial.lipi.go.id/main/wp-tahun-2008-tentang-sistem-pengendalian-intern-pemerintah.pdf>, diakses 10 Mei 2022).
- Rama, D. V., & Jones, F. L. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Business (Edisi Keempat ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar (Edisi Kelima ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiasmini, M. E., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. G. (2017). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada Sistem Akuntansi Penerimaan Kas atas Pendapatan*

- Iklan dan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan (Studi pada PT Guntur IB 29). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*(Vol.7 No.1), 1-12.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Internal Berbasis Resiko*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utomo, A. (2019). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada Pdam Tirta Jeneberang Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar, Akuntansi. Makassar: Digital Library Unismuh Makassar.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability (Thirteenth Edition)*. New Jersey: Pearson Education.